

TESIS

**HARMONISASI HUKUM ANTARA KUHP
NASIONAL DAN HUKUM ADAT DAYAK
BERDASARKAN PERJANJIAN
TUMBANG ANOI**



Oleh :

OKLIVIANI
NIM. 2420215320029

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**HARMONISASI HUKUM ANTARA KUHP NASIONAL DAN
HUKUM ADAT DAYAK BERDASARKAN
PERJANJIAN TUMBANG ANOI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**OKLIVIANI
NIM. 2420215320029**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**Judul Tesis : Harmonisasi Hukum Antara KUHP Nasional dan Hukum Adat Dayak
Berdasarkan Perjanjian Tumbang Anoi**

Nama : Okliviani

NIM : 2420215320029

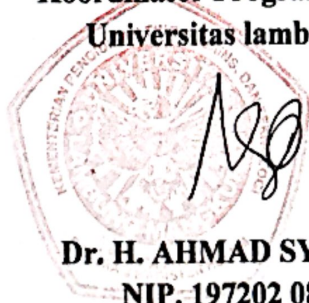
**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**



**Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.
NIP. 196804 14199412 2 001**

Diketahui

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas lambung Mnagkurat**



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 197202 08199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805 02200112 2 002**

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

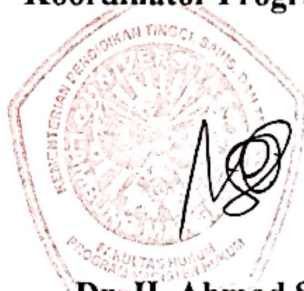
**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 13 Juli 2026**

Pembimbing



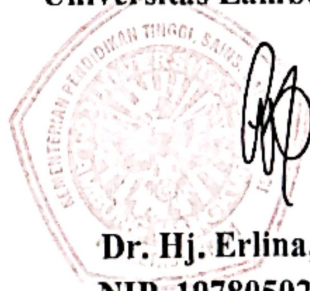
**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okliviani

NIM : 2420215320029

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Okliviani
NIM. 2420215320029

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 09 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

MOTTO DAN PESEMBAHAN

MOTTO

“Nyuang petak nguntep dunia, ela manggawi taluh je papa.”

(Kandayu Parawei : 6)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Ranying Hatalla Langit atas Kuasa-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya tesis ini Penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta yang senantiasa hadir dalam setiap proses kehidupan Penulis.

Kepada Mamah dan Babah yang telah memberikan dukungan, serta doa yang Mamah dan Babah panjatkan di setiap langkah kehidupan, setiap pengorbanan yang tidak pernah diucapkan namun selalu dirasakan, serta setiap dukungan yang diberikan tanpa pamrih menjadi kekuatan terbesar Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kepada Kaka dan Keponakan yang selalu memberikan semangat dan dukungan sampai tesis ini bisa Penulis selesaikan, Penulis berterima kasih.

Serta kepada Dosen Pembimbing Tesis saya persembahkan dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan dalam membimbing Penulis sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian tesis ini

OKLIVIANI. 2026. Harmonisasi Hukum Antara KUHP Nasional dan Hukum Adat Dayak Berdasarkan Perjanjian Tumbang Anoi. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.** 106 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan Hukum Adat Dayak berdasarkan Perjanjian Tumbang Anoi sebagai upaya mewujudkan sistem hukum pidana yang mampu mengakomodasi keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut pluralisme hukum, di mana hukum negara hidup berdampingan dengan hukum adat. Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan mendasar antara sistem hukum pidana nasional yang berorientasi pada asas legalitas dan penghukuman dengan Hukum Adat Dayak yang lebih menekankan musyawarah, perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta keseimbangan kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara yang melibatkan masyarakat adat, sehingga diperlukan suatu harmonisasi agar kedua sistem hukum dapat berjalan secara selaras tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Perjanjian Tumbang Anoi, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum adat, serta harmonisasi hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum, dan konsep *living law* dari Eugen

Ehrlich sebagai landasan untuk menganalisis hubungan antara hukum pidana nasional dan Hukum Adat Dayak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Hukum Adat Dayak memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melalui Pasal 2 memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Ketentuan ini menunjukkan perubahan paradigma hukum pidana nasional yang tidak lagi hanya berorientasi pada hukum tertulis, tetapi juga memberikan ruang bagi norma-norma hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, Hukum Adat Dayak memperoleh legitimasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa kehilangan karakteristiknya sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Perjanjian Tumbang Anoi merupakan salah satu sumber hukum adat yang memiliki nilai historis, filosofis, dan yuridis yang penting bagi masyarakat Dayak. Perjanjian yang lahir dari Kongres Tumbang Anoi tahun 1894 tersebut berhasil mengakhiri tradisi mengayau, menghapus praktik perbudakan, serta menyatukan berbagai ketentuan hukum adat Dayak ke dalam suatu kesepakatan bersama. Hingga saat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Perjanjian Tumbang Anoi masih dipertahankan dan dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa adat melalui musyawarah, pemberian ganti kerugian, perdamaian, serta pemulihan keseimbangan sosial. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa Hukum Adat Dayak lebih mengutamakan keadilan restoratif dibandingkan keadilan retributif yang selama ini menjadi orientasi utama sistem hukum pidana negara.

Dalam analisis terhadap beberapa ketentuan Perjanjian Tumbang Anoi, penelitian ini menemukan adanya titik temu sekaligus perbedaan dengan pengaturan dalam KUHP Nasional. Salah satunya terdapat pada Pasal 84 Perjanjian Tumbang

Anoi mengenai pertanggungjawaban terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Ketentuan tersebut memiliki kesamaan dengan KUHP Nasional yang mengakui bahwa seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat diperlakukan sebagaimana pelaku tindak pidana pada umumnya. Akan tetapi, Hukum Adat Dayak memperluas tanggung jawab dengan membebankan kewajiban adat kepada keluarga yang lalai mengawasi anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain. Konsep tersebut tidak dikenal dalam hukum pidana nasional yang berpegang pada asas pertanggungjawaban pidana individual. Temuan ini menunjukkan bahwa Hukum Adat Dayak memiliki pendekatan yang lebih menitikberatkan pada tanggung jawab sosial dan pemulihan keseimbangan masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara KUHP Nasional dan Hukum Adat Dayak bukan dimaksudkan untuk menghilangkan salah satu sistem hukum, melainkan membangun hubungan yang saling melengkapi melalui pengakuan terhadap nilai-nilai hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat. Harmonisasi dapat diwujudkan melalui penguatan kedudukan lembaga adat, pemberian pengakuan terhadap penyelesaian sengketa adat dalam batas-batas tertentu, serta penyusunan kebijakan hukum pidana yang mengakomodasi nilai-nilai musyawarah, perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Dengan demikian, keberadaan Hukum Adat Dayak berdasarkan Perjanjian Tumbang Anoi tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya bangsa, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, bermanfaat, responsif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

OKLIVIANI. 2026. Harmonisasi Hukum Antara KUHP Nasional dan Hukum Adat Dayak Berdasarkan Perjanjian Tumbang Anoi. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.** 106 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Hukum Adat, KUHP, Harmonisasi

Adanya potensi kekosongan hukum yang muncul akibat perbedaan antara KUHP Nasional yang berlandaskan asas legalitas dengan Hukum Adat Dayak yang tercermin dalam Perjanjian Tumbang Anoi yang berorientasi pada keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan paradigma tersebut menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum serta merumuskan strategi harmonisasi antara hukum nasional dan nilai keadilan lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan sumber hukum primer seperti UUD 1945, KUHP 2023, UU HAM, Perda Kalimantan Tengah, Perjanjian Tumbang Anoi, dan dilengkapi dengan literatur sekunder serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat sering kali tidak memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan risiko pemidanaan ganda. Selain itu, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan lembaga adat dan kekuatan eksekutorial putusan adat memperkuat terjadinya kekosongan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara KUHP Nasional dan Hukum Adat Dayak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi identitas budaya serta hak masyarakat adat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji praktik empiris penyelesaian sengketa adat Dayak guna menghasilkan model integrasi yang lebih aplikatif.

OKLIVIANI. 2026. *Harmonizing the National Criminal Code and Dayak Customary Law Based on the Tumbang Anoi Agreement*. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H. 106 page.**

ABSTRACT

Keywords: Customary Law, Criminal Code, Harmonization

There is a potential legal vacuum that arises due to differences between the National Criminal Code which is based on the principle of legality and the Dayak Customary Law which is reflected in the Tumbang Anoi Agreement which is oriented towards restorative justice. This research aims to analyze how these paradigm differences cause gaps in law enforcement and formulate a harmonization strategy between national law and local justice values. The method used is normative legal research with a statute and conceptual approach, using primary legal sources such as the 1945 Constitution, the 2023 Criminal Code, the Human Rights Law, the Central Kalimantan Regional Regulation, the Anoi Tumbang Agreement, and is complemented by secondary literature and previous research. The results show that dispute resolution through customary mechanisms often does not gain recognition in the national legal system, resulting in legal uncertainty, overlapping authority, and the risk of double criminalization. In addition, the lack of clear regulations regarding the authority of customary institutions and the executory power of customary decisions strengthens the legal vacuum. This study concludes that harmonization between the National Criminal Code and Dayak Customary Law is needed to ensure legal certainty while protecting the cultural identity and rights of indigenous peoples. Further research is suggested to examine the empirical practice of Dayak customary dispute resolution in order to produce a more applicable integration model.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirant Ranying Hatalla Langit, atas asung kerta wara nugraha-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis yag berjudul **“Harmonisasi Hukum Antara KUHP Nasional dan Hukum Adat Dayak Berdasarkan Perjanjian Tumbang Anoi”** ini dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang sangat terpelajar **Ibu Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terpelajar **Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terpelajar **Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memberikan masukan-masukan berharga sejak awal penyusunan proposal hingga tesis ini dapat diselesaikan. Bimbingan, ilmu, dan teladan yang Ibu berikan menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, tetapi juga dalam

membentuk cara berpikir kritis dan bertanggung jawab sebagai seorang akademisi hukum;

4. Kepada **Tim Dosen Penguji** atas waktu, kritik, dan saran konstruktif yang telah diberikan demi penyempurnaan tesis ini;
5. Kepada **Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan;
6. Kepada **Kedua orang tua tercinta**, atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terhingga, dan dukungan moril maupun materil yang menjadi kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini;
7. Kepada **Sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan**, di Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kebersamaan, diskusi, dan semangat yang saling diberikan selama menempuh Pendidikan ini;
8. Kepada **Seluruh pihak**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang mebangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai asas retroaktif dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.

Hormat Penulis,

Okliviani

NIM. 2420215320029

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKAN MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	4
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Tinjauan Konseptual.....	16
F. METODE PENELITIAN.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian.....	40
3. Tipe Penelitian.....	40
4. Pendekatan Masalah.....	41

5. Jenis Bahan Hukum.....	41
G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN...	42
BAB II POTENSI KEKOSONGAN HUKUM YANG MUNCUL AKIBAT PERBEDAAN PENDEKATAN PENYELESAIAN SENKETA ANTARA KUHP NASIONAL DAN HUKUM ADAT DAYAK.....	44
A. Perbedaan Penyelesaian Sengketa Dalam KUHP Nasional Dan Hukum Adat Dayak Perjanjian Tumbang Anoi.....	44
B. Potensi Kekosongan Hukum Akibat Perbedaan Pendekatan Penyelesaian Sengketa.....	58
C. Dampak Kekosongan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Dan Masyarakat Adat Dayak.....	70
BAB III BENTUK HARMONISASI HUKUM ANTARA KUHP NASIONAL DAN HUKUM ADAT DAYAK BERDASARKAN PERJANJIAN TUMBANG ANOI TANPA MENGHILANGKAN KARAKTERISTIK KEADILAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK.....	75
A. Pengakuan Hukum Adat Dayak Dalam Sistem Hukum Nasional.....	75
B. Harmonisasi Antara KUHP Nasional Dan Hukum Adat Dayak Berdasarkan Perjanjian Tumbang Anoi.....	81
C. Perlindungan Karakteristik Keadilan Lokal Masyarakat Dayak.....	88
BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Ketentuan Perjanjian Tumbang Anoi yang tidak terkandung dalam KUHP Nasional.....	82